

**POLITIK PENGUASAAN LAHAN ANDIL DALAM PENGELOLAAN
HUTAN PANGKUAN DESA PITU DI KAWASAN HUTAN DENGAN
TUJUAN KHUSUS UNIVERSITAS GADJAH MADA**

Oleh:

Ardan Ceanturi¹, Bowo Dwi Siswoko²

INTISARI

Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) merupakan kawasan hutan yang ditetapkan oleh pemerintah secara khusus diperuntukkan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan kehutanan, pendidikan dan pelatihan kehutanan secara religi dan budaya. Pengelolaan hutan tidak akan terlepas dari aktifitas politik berbagai aktor agar mereka mendapat kemanfaatan yang sebesar-besarnya dari hutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi politik penguasaan dan pemanfaatan lahan andil pada Hutan Pangkuan Desa Pitu.

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus merupakan bentuk model penelitian kualitatif yang terperinci mengenai suatu individu atau kelompok sosial selama kurun waktu tertentu. Penelitian ini dilakukan di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) UGM berada di Desa Pitu, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode studi kasus yang diperoleh dengan teknik observasi pada kondisi lapangan, wawancara mendalam (*indepth interview*) dan studi literatur. Wawancara dilakukan kepada kelompok dan *Stakeholder* terkait pengelolaan kawasan hutan.

Hasil penelitian menunjukkan terdapat perubahan hak kelola dari Perum Perutani kepada UGM, khususnya perbedaan dalam dinamika melaksanakan pengelolaan hutan di HPD Pitu. Berbagai aktor melakukan tindakan politik agar dapat menguasai dan memanfaatkan lahan andil di kawasan HPD Pitu yang hal tersebut menimbulkan terjadinya konflik kepentingan antar pihak yang terlibat dalam pengelolaan hutan. Masing-masing pihak ingin mendapatkan kemanfaatan yang sebesar-besarnya dari lahan andil tersebut dengan cara antara lain : berusaha mendapatkan lahan garapan yang sebesar-besarnya, memilih lahan yang subur, menanam lahan andil tersebut dengan tanaman yang paling menguntungkan walaupun dilarang (misalnya tebu).

Kata kunci : politik, pengelolaan hutan, penguasaan, lahan andil

¹ Mahasiswa Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada

² Dosen Pengajar Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada

**THE POLITICS OF ARABLE LAND AUTHORITY IN THE PITU VILLAGE
FOREST MANAGEMENT AT THE FOREST AREA WITH SPECIAL
OBJECTIVE OF UNIVERSITAS GADJAH MADA**

By:

Ardan Ceanturi¹, Bowo Dwi Siswoko²

ABSTRACT

Forest of Special Objective (KHDTK) is forest areas designated for purposes of forest research and forest science development, education, and training by religious and cultural forestry. Forest management doesn't separate from the political activities of various aktors so that they get the maximum benefit from the forest. This research aims to identify the political dominance and utilization of arable land authority in the Pitu Desa Village Forest.

This research used case study method. Case study methods were form of a detailed qualitative research model about an individual or social group over a certain period of time. This research was conducted in the Forest Area With Special Objective (KHDTK) UGM at Pitu Village, Pitu District, Ngawi Regency. The data collection technique was carried out using a case study method obtained by using observation techniques on field conditions, in-depth interviews, and literature studies. Interviews were conducted with groups and stakeholders related to forest area management.

The results showed there was a change in management rights from Perum Perutani to UGM, especially differences in the dynamics of implementing forest management in HPD Pitu. Various aktors took political actions to control and utilize the share of land in the Pitu HPD area, which lead to conflicts of interest between parties involved in forest management. Stakeholders want to get the maximum benefit from the arable land in the following ways: trying to get as much arable land, choosing fertile land, planting arable land with the most profitable crops even though it is forbidden (i.e., sugar cane).

Keywords : politics, forest management, domination, land arable authority

¹ Student of Forest Management Departement, Faculty of Forestry, Universitas Gadjah Mada

¹ Lecturer of Forest Management Departemen, Faculty of Forestry, Universitas Gadjah Mada